

BAB IV

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan tinjauan penulis mengenai pengadaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun tahun anggaran 2021. Didapat beberapa inti mengenai implementasi, kendala, dan solusi pada pengadaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun. Poin-poin yang dapat disimpulkan dari pembahasan sebagai berikut:

1. Implementasi pengadaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun dilakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku melalui beberapa tahap. Pada tahap perencanaan, KPPN Madiun dengan bantuan tenaga ahli mempersiapkan dokumen-dokumen yang formatnya sudah diberikan oleh Kantor Pusat. KPPN Madiun hanya melakukan pengecekan melalui aplikasi dan menerima hasil tender yang dilaksanakan oleh pusat. Kemudian pada tahap pelaksanaan, pengawasan dilakukan oleh UKPBJ dengan tenaga ahli yang melaporkan setiap perkembangan pekerjaan. Pemeliharaan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh penyedia sebagai jaminan sesuai pedoman. Peraturan yang digunakan KPPN Madiun dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi rumah dinas adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

2. Kendala dari pengadaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun ini terdapat pada koordinasi dari pusat dengan daerah. Kendala ini menimbulkan ketidaksielarasan komunikasi yang menyebabkan kesalahan informasi yang diterima oleh satker daerah. Perubahan peraturan justru tidak menjadi dampak yang cukup besar dalam proses pengadaan ini karena pejabat pengadaan barang dan jasa pasti mengerti jika ada perubahan peraturan. Adanya perubahan peraturan bukan menjadi kendala utama pada proses pengadaan.
3. Solusi terhadap kendala koordinasi antara pusat dengan daerah adalah meningkatkan respon apabila ada masalah dari pusat ke daerah maupun sebaliknya dan solusi untuk komunikasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi dilakukan pendekatan secara langsung maupun aplikasi *messenger*.